

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN (TKSK) DALAM PEMBERDAYAAN  
PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA  
DI KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE**

**SKRIPSI**

**RAIHIL MISKY  
NIM. 190405037  
Prodi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1447 H/2026 M**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI**

**PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM  
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DI  
KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE**



## SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan Kesejahteraan Sosial


Dijukan Oleh:  
**RAIHU MISKY**  
NIM. 190405037

Pada Hari/Tanggal  
04 Februari 2026 M  
Senin, 16 Sya'ban 1447 H

Di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


  
**Dr. Sabirin, S.Sos.I, M.Si**  
NIP. 198401272011011008

  
**Hijrah Saputra, S.Fil.I, M.Sos.**  
NIP. 199007212020121016

Penguji I


Penguji II

  
**Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D**  
NIP. 198307272011011011

  
**Wirda Amalia, M.Kesos**  
NIP. 198909242022032001

AR - RANIRY

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
  
**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.**  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : RAIHIL MISKY  
NIM : 190405037  
Jenjang : Sarjana S-1  
Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 29 April 2026

Yang Menyatakan,



Raihil Miskiy  
NIM. 190405037

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra Di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

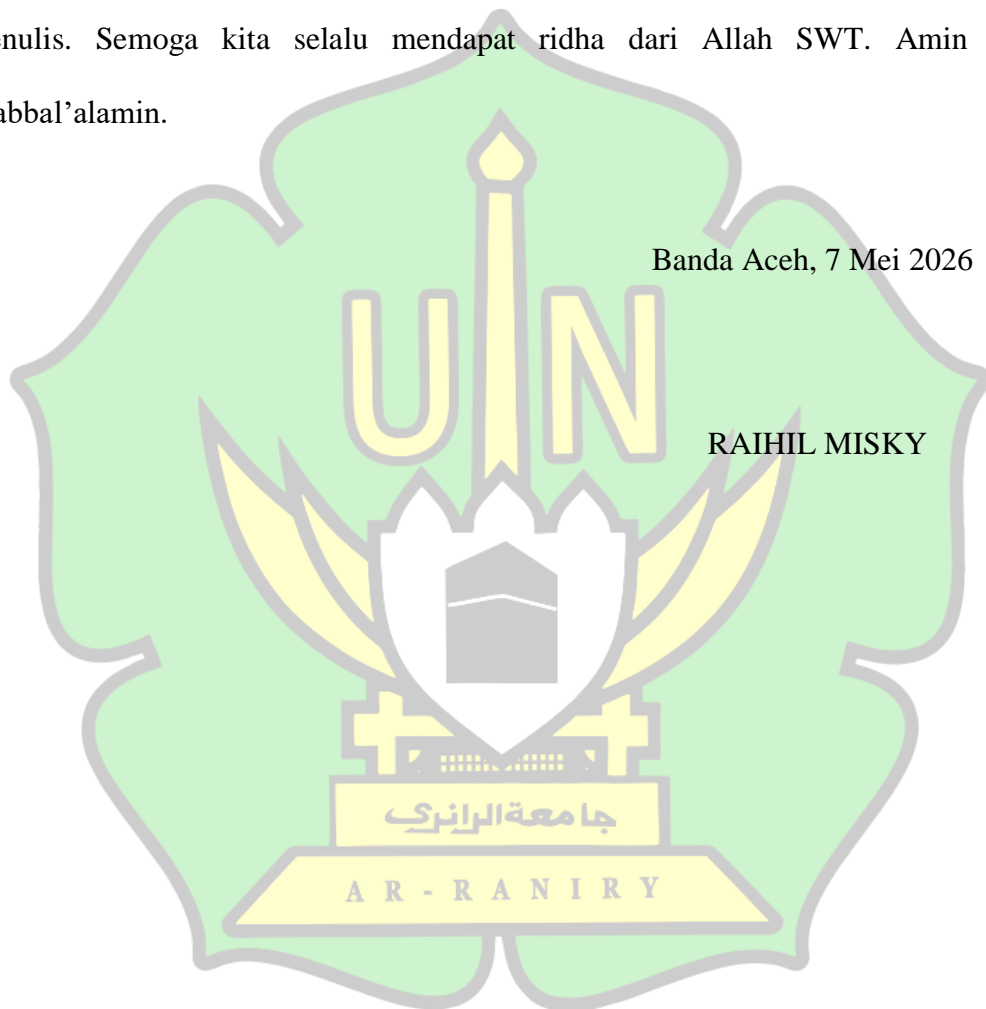
Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu hadir dalam setiap doa, perjuangan, dan tetes air mata penulis. Terima kasih atas cinta yang tak ternilai dan dukungan yang tiada henti.
2. Kusmawati Hatta selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, yang telah memberikan ruang, kesempatan, serta motivasi dalam menyelesaikan tugas akademik ini.
4. Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si., selaku Pembimbing I sekaligus menjadi Dosen penasihat akademik saya, yang telah memberikan wawasan kritis dalam memahami aspek teoritis serta menjadi sosok pembina yang inspiratif.
5. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis, memberikan arahan yang berharga, serta menjadi sumber inspirasi intelektual.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Kepada seluruh informan yang sudah membantu penulis dalam hal pengumpulan data penelitian, dan juga memberikan informasi sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan maksimal.
8. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya yang luar biasa, dan seluruh angkatan 2019 Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 7 Mei 2026

RAIHIL MISKY



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja, serta adanya stigma sosial yang memengaruhi partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, TKSK berperan sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tingkat kecamatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari TKSK, penyandang disabilitas tuna netra, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKSK berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan pendamping dalam proses pemberdayaan. TKSK membantu akses terhadap bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta menjembatani hubungan dengan berbagai lembaga pendukung. Namun, pelaksanaan pemberdayaan belum optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan yang sesuai kebutuhan, minimnya fasilitas ramah disabilitas, serta rendahnya kepercayaan diri penyandang disabilitas akibat stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran TKSK cukup signifikan, namun masih memerlukan penguatan melalui dukungan kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta pengembangan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *TKSK, pemberdayaan, disabilitas tuna netra dan kesejahteraan sosial*



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan .....	15
B. Teori Yang Relevan .....	19
1. Teori peran (role theory) .....	19
2. Teori pemberdayaan (empowerment theory) .....	22
3. Teori Disabilitas .....	24
4. Teori keadilan sosial (social justice theory).....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian .....	29
B. Metode Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Prosedur Penelitian.....	33
E. Populasi dan Sampel .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis dan Pengelolaan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian .....	38
B. Karakteristik Informan .....	43
C. Peran TKSK dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra .	48
1. Peran sebagai Fasilitator .....	48
2. Peran sebagai Mediator .....	49
3. Peran sebagai Pendamping.....	50
4. Peran sebagai Penghubung (Linking Role).....	50

D.	Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra.....	52
1.	Bantuan Sosial.....	52
2.	Pelatihan Keterampilan .....	53
3.	Pendampingan Sosial .....	55
4.	Akses terhadap Layanan Pemerintah .....	55
E.	Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra.....	56
1.	Faktor Pendukung .....	56
2.	Faktor Penghambat.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>66</b>
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam perspektif pembangunan modern, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin kesetaraan akses, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok yang mengalami keterbatasan.<sup>1</sup>

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan di lingkungan dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kurangnya aksesibilitas, terbatasnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta masih adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat, sehingga seringkali menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar, termasuk pendidikan yang inklusif, kesempatan kerja yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12–15.

<sup>2</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Kemensos RI, 2018.

Negara memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan melalui penyusunan kebijakan, regulasi, serta program-program yang berorientasi pada perlindungan, pemenuhan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas, negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas hambatan, baik secara fisik maupun nonfisik, agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara mandiri dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga upaya pemenuhan hak-hak mereka tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.<sup>3</sup>

Perhatian terhadap penyandang disabilitas khususnya terhadap disabilitas tuna netra semakin diperkuat dengan hadirnya berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara sebagai warga negara. Undang-undang tersebut tidak hanya menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang harus diberdayakan. Konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena selama ini pendekatan yang digunakan cenderung bersifat karitatif atau bantuan semata, sehingga belum mampu mendorong kemandirian penyandang disabilitas

---

<sup>3</sup>World Health Organization, *World Report on Disability* (Geneva: WHO Press, 2011), hlm. 3-5.

secara optimal.<sup>4</sup>

Meskipun secara regulasi telah terjadi kemajuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas khususnya disabilitas tuna netra masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural. Hambatan struktural meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, fasilitas umum yang belum ramah disabilitas, serta peluang kerja yang masih terbatas. Sementara itu, hambatan kultural berupa stigma negatif dari masyarakat seringkali menyebabkan penyandang disabilitas tuna netra dipandang sebagai kelompok yang tidak produktif dan bergantung pada orang lain.<sup>5</sup> Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat marginalisasi sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas tuna netra, sehingga mereka sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan.

Salah satu jenis disabilitas yang memerlukan perhatian khusus adalah disabilitas tuna netra. Penyandang tuna netra merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan, baik sebagian (*low vision*) maupun secara total (*blindness*), sehingga berdampak signifikan terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan dalam penglihatan tidak hanya mempengaruhi aspek mobilitas, tetapi juga membatasi akses terhadap informasi, pendidikan, serta interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Kondisi ini seringkali menempatkan penyandang tuna netra pada posisi yang kurang menguntungkan,

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016), Pasal 1 dan Pasal 5.

<sup>5</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 45–47.

terutama dalam hal memperoleh kesempatan kerja yang layak. Minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta kurangnya dukungan lingkungan yang inklusif, menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing penyandang tuna netra. Akibatnya, tingkat kemandirian ekonomi penyandang tuna netra cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>6</sup>

Penyandang tuna netra tidak hanya menghadapi hambatan secara fisik, tetapi juga berbagai tantangan psikologis dan sosial yang cukup kompleks. Keterbatasan dalam penglihatan seringkali berimplikasi pada rendahnya kepercayaan diri, terutama ketika lingkungan sosial belum sepenuhnya memberikan dukungan yang inklusif. Kurangnya penerimaan sosial serta terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dapat menghambat proses aktualisasi diri penyandang tuna netra. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan motivasi untuk berkembang dan berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial.<sup>7</sup>

Konsep pemberdayaan dalam kajian kesejahteraan sosial dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengendalikan kehidupannya secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan, tetapi

---

<sup>6</sup>World Health Organization, *Blindness and Vision Impairment* (Geneva: WHO, 2019), hlm. 2–4.

<sup>7</sup>Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 120–123.

juga mencakup penguatan kemampuan dalam mengambil keputusan serta mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan, pemberdayaan juga upaya untuk memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah agar mampu menentukan pilihan serta tindakan dalam kehidupannya secara lebih mandiri dan bermartabat.<sup>8</sup>

Dalam konteks penyandang disabilitas, pemberdayaan memiliki makna yang lebih luas, yaitu menciptakan kesempatan, membuka akses, serta menyediakan dukungan yang berkelanjutan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada terciptanya kemandirian dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks penyandang disabilitas, pemberdayaan berarti memberikan kesempatan, akses, serta dukungan yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.<sup>9</sup>

Pemberdayaan menjadi sangat penting sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang tuna netra, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pelatihan keterampilan semata, tetapi juga mencakup penguatan aspek psikologis, peningkatan akses terhadap informasi, serta penciptaan lingkungan sosial yang inklusif dan ramah disabilitas. Melalui pendekatan pemberdayaan yang komprehensif, diharapkan penyandang tuna netra

---

<sup>8</sup>Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 130–132.

<sup>9</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 65–67.

mampu mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemandirian, serta berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan penyandang disabilitas, peran pemerintah menjadi sangat penting, khususnya melalui berbagai program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di tingkat lokal. Salah satu aktor yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKSK merupakan tenaga sosial yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, termasuk dalam hal pendataan, pendampingan, serta fasilitasi program sosial, keberadaan TKSK menjadi penting karena mereka berada di garis depan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi sosial yang terjadi di wilayahnya.<sup>11</sup>

Peran TKSK tidak hanya sebatas sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks penyandang disabilitas, TKSK diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan, menghubungkan dengan layanan yang tersedia, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, TKSK juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 77–80.

<sup>11</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2018), hlm. 3–6.

<sup>12</sup> Zastrow, Charles, *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Boston: Cengage Learning, 2010), hlm. 210–215.

Dalam pelaksanaan peran, TKSK di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai kendala, beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus terkait penanganan disabilitas, serta minimnya dukungan anggaran. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kondisi ini menyebabkan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, belum berjalan secara maksimal.<sup>13</sup>

Fenomena keterbatasan pemberdayaan penyandang disabilitas juga terlihat di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, penyandang disabilitas tuna netra di wilayah ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan yang sesuai, minimnya fasilitas pendukung yang ramah disabilitas, serta terbatasnya peluang kerja yang dapat diakses oleh mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra secara optimal.<sup>14</sup>

Faktor sosial juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam proses pemberdayaan. Stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas tuna netra seringkali dipandang sebagai kelompok yang kurang produktif dan bergantung pada orang lain. Hal ini

---

<sup>13</sup> Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 134–137.

<sup>14</sup> Hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, pada tanggal 28 Juli 2025

berdampak pada rendahnya partisipasi sosial serta terbatasnya kesempatan mereka untuk berkembang. Dalam situasi tersebut, peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi sangat penting sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dengan berbagai program pemerintah. Melalui peran tersebut, TKSK diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan, memberikan pendampingan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas tuna netra.<sup>15</sup>

Dengan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, diharapkan penyandang disabilitas tuna netra dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, serta mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Peran TKSK sebagai fasilitator, pendamping, dan penghubung antara masyarakat dengan berbagai program kesejahteraan sosial menjadi sangat strategis dalam mendukung proses pemberdayaan tersebut.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, efektivitas peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat di lapangan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh kondisi sosial, sumber daya, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Kajian mengenai peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peran tersebut

---

<sup>15</sup> Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 130–132.

telah dijalankan secara optimal, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.”

#### B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie:

1. Untuk mengetahui peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, Maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung atau tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi kesejahteraan sosial, sosial-ekonomi, strategi adaptasi pelaku usaha mikro di era digital.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial dan TKSK, dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan penyandang disabilitas.
- b. Bagi akademisi, lembaga pemberdayaan dan pelatihan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam pengembangan kajian terkait pemberdayaan sosial dan disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya inklusi sosial, penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, serta peningkatan

kepedulian masyarakat terhadap kelompok tuna netra secara lebih luas dan berkelanjutan.

- c. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan, serta memperkaya pengalaman peneliti dalam memahami secara komprehensif peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis ilmiah dalam mengkaji permasalahan sosial secara lebih kritis dan sistematis.

#### E. Penjelasan Istilah

Agar Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan secara lebih rinci sebagai berikut:

##### 1. Peran

Pedagang Peran merupakan seperangkat tugas, fungsi, hak, dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem sosial. Konsep peran tidak hanya mencakup apa yang dilakukan oleh individu atau lembaga, tetapi juga bagaimana perilaku tersebut disesuaikan dengan norma, nilai, dan harapan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, peran bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi, serta tuntutan lingkungan sosial yang berkembang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.

Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud merujuk pada segala bentuk aktivitas, kontribusi, serta tanggung jawab yang dijalankan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Peran tersebut meliputi upaya pendampingan sosial, fasilitasi akses terhadap layanan, serta penguatan kapasitas individu agar mampu hidup lebih mandiri, berdaya, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat dan ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Keberadaan TKSK menjadi penting karena berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar memperoleh pelayanan sosial yang memadai.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya, TKSK memiliki berbagai tugas dan fungsi, seperti melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), memberikan pendampingan kepada penerima manfaat, memfasilitasi bantuan sosial, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam penelitian ini, TKSK diposisikan sebagai aktor kunci yang memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra dengan program pemberdayaan yang tersedia.

---

<sup>17</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)* (Jakarta: Kemensos RI, 2018), hlm. 15.

### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, serta kemandirian individu atau kelompok agar mampu mengelola kehidupannya sendiri secara lebih baik. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi lebih menekankan pada penguatan potensi, peningkatan keterampilan, serta akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.<sup>18</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra mencakup berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan hidup (life skills), serta akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Melalui proses pemberdayaan, diharapkan penyandang disabilitas tuna netra dapat hidup secara mandiri, memiliki kesempatan yang setara, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

### 4. Disabilitas Tuna Netra

Disabilitas tuna netra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan, baik sebagian (low vision) maupun secara total (buta), yang berdampak pada keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelainan bawaan, penyakit, kecelakaan, maupun faktor usia, yang mengakibatkan penurunan atau hilangnya kemampuan melihat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 59.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam perspektif sosial, disabilitas tuna netra tidak hanya dipandang sebagai keterbatasan individu, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa aksesibilitas lingkungan, penggunaan alat bantu seperti huruf braille dan tongkat, serta layanan pendidikan dan pelatihan yang sesuai agar penyandang disabilitas tuna netra dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Untuk memudahkan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai macam literature penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi. Ada beberapa hasil penelitian yang penting terkait dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rahmawati, D., & Suyanto, B. dalam penelitian berjudul "*Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran TKSK dalam mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, khususnya dalam menangani berbagai kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKSK memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjangkau masyarakat, terutama dalam hal pendataan, pendampingan, serta penyaluran bantuan sosial. Selain itu, TKSK juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan instansi terkait, sehingga membantu mempercepat proses pelayanan sosial.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas peran TKSK sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kompetensi individu, pengalaman kerja, serta motivasi dalam menjalankan tugas. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan kelembagaan,

ketersediaan anggaran, serta koordinasi lintas sektor. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pelatihan teknis dan minimnya fasilitas operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, N., & Hidayat, R. dalam *“Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Kota Surakarta”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk program pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas serta dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, kuliner, dan jasa, mampu memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh penghasilan secara mandiri. Selain itu, adanya bantuan modal usaha dan pendampingan secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program tersebut. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan, seperti keterbatasan akses terhadap pasar, kurangnya kepercayaan diri dari penyandang disabilitas, serta stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan hasil pemberdayaan belum merata dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan dukungan sosial dan kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian ini

---

<sup>20</sup> Rahmawati, D., & Suyanto, B. (2019). *Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(2).

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>21</sup>

3. Penelitian oleh Wulandari, S., & Nugroho, A. dalam “*Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Balai Rehabilitasi Sosial*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam proses rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial, membangun kepercayaan diri, serta membantu penyandang tuna netra dalam mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan seperti membaca huruf braille, orientasi mobilitas, serta keterampilan kerja tertentu yang dapat menunjang kemandirian ekonomi. Proses pendampingan yang dilakukan secara intensif terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan adaptasi sosial penyandang tuna netra. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga profesional menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pratiwi, N., & Hidayat, R. (2020). Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1).

<sup>22</sup> Wulandari, S., & Nugroho, A. (2018). Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi tuna netra. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(3).

4. Penelitian oleh Saputra, R., & Lestari, M. dalam *“Implementasi Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Sleman”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta pendampingan usaha. Program-program tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan. Selain itu, monitoring dan evaluasi program yang belum maksimal juga menjadi kendala dalam memastikan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar pihak serta penguatan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>23</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, L., & Kurniawan, F. dalam *“Hambatan Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai

---

<sup>23</sup> Saputra, R., & Lestari, M. (2019). Implementasi program pemberdayaan disabilitas oleh Dinas Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).

hambatan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas dalam proses pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari keterbatasan individu, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor lingkungan sosial yang belum inklusif. Stigma negatif, diskriminasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat utama dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa kurangnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, serta fasilitas publik yang ramah disabilitas semakin memperburuk kondisi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk bersaing dalam dunia kerja dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam pemberdayaan disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur.<sup>24</sup>

## B. Teori Yang Relevan

### 1. Teori peran (*role theory*)

Strategi Pendekatan penting dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku individu maupun lembaga dibentuk oleh posisi atau status yang mereka tempati dalam struktur sosial. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi tertentu dalam sistem sosial. Konsep ini menegaskan

---

<sup>24</sup> Hidayati, L., & Kurniawan, F. (2021). Hambatan sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 12(1).

bahwa setiap individu atau aktor sosial tidak bertindak secara bebas sepenuhnya, melainkan dipengaruhi oleh seperangkat norma, nilai, serta harapan sosial yang melekat pada statusnya. Dengan demikian, peran mencerminkan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu, di mana struktur memberikan batasan sekaligus pedoman bagi perilaku.<sup>25</sup>

Membedakan secara tegas antara *status* dan *peran*. Status merujuk pada posisi seseorang dalam masyarakat, baik yang diperoleh sejak lahir (*ascribed status*) maupun yang dicapai melalui usaha (*achieved status*), sedangkan peran adalah aspek dinamis berupa perilaku yang dijalankan sesuai dengan status tersebut.<sup>26</sup> Sementara itu. Memperkaya teori ini dengan konsep *role set*, yaitu sekumpulan peran yang melekat pada satu status sosial, serta kemungkinan munculnya *role conflict* (konflik peran) dan *role strain* (ketegangan peran). Konflik peran terjadi ketika seseorang menghadapi tuntutan dari berbagai peran yang saling bertentangan, sedangkan ketegangan peran muncul ketika tuntutan dalam satu peran terlalu kompleks atau sulit dipenuhi.

Teori peran juga menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam pembentukan peran. Individu atau aktor kelembagaan belajar memahami dan menjalankan perannya melalui interaksi sosial, pengalaman, serta internalisasi nilai dan norma yang berlaku. Dalam hal ini, Talcott Parsons memandang peran sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan (*equilibrium*) masyarakat. Setiap aktor diharapkan menjalankan perannya secara

---

<sup>25</sup> Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, New York: Academic Press, 1979.

<sup>26</sup> Ralph Linton, *The Study of Man*, New York: Appleton-Century, 1936.

fungsional agar sistem sosial dapat berjalan secara harmonis. Jika terjadi penyimpangan atau kegagalan dalam menjalankan peran, maka dapat mengganggu stabilitas sistem sosial secara keseluruhan.

Dalam konteks kelembagaan, teori peran menjadi alat analisis untuk memahami bagaimana suatu institusi atau aktor menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hal ini sangat relevan dalam menganalisis peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai bagian dari sistem pelayanan sosial. TKSK memiliki peran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan relasional, yaitu sebagai fasilitator yang membantu akses terhadap sumber daya sosial, mediator yang menjembatani kepentingan antara penyandang disabilitas dengan berbagai pihak, pendamping sosial yang memberikan dukungan psikososial dan pemberdayaan, serta penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam implementasi kebijakan sosial.

Dengan menggunakan perspektif teori peran, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian antara peran yang diharapkan (*expected role*) dengan peran yang dijalankan (*actual role*) oleh TKSK di lapangan. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menunjukkan adanya hambatan struktural maupun kultural, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, lemahnya koordinasi antar lembaga, atau masih adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Sebaliknya, kesesuaian yang tinggi menunjukkan bahwa TKSK mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.

Lebih jauh lagi, efektivitas peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kemampuan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat kemandirian individu, serta mendorong partisipasi sosial. Dengan demikian, teori peran tidak hanya membantu menjelaskan posisi dan fungsi TKSK, tetapi juga menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi sosial yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif.

## 2. Teori pemberdayaan (*empowerment theory*)

Pendekatan yang menekankan pada proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan komunitas agar memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan mereka sendiri. Menurut Julian Rappaport, pemberdayaan adalah proses melalui mana individu, organisasi, dan masyarakat memperoleh kekuatan (*power*) untuk mengendalikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam perspektif ini, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan atau intervensi dari luar, tetapi sebagai upaya membangun kesadaran kritis, kapasitas, dan kemandirian agar individu mampu bertindak secara aktif dalam menentukan masa depannya.

Pemberdayaan memiliki beberapa dimensi utama, yaitu peningkatan kapasitas (*capacity building*), akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kemandirian sosial dan ekonomi. Peningkatan kapasitas mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memungkinkan individu berfungsi secara optimal. Akses terhadap sumber daya

meliputi kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan sosial, dan teknologi. Partisipasi menekankan keterlibatan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sedangkan kemandirian menunjukkan kemampuan individu untuk tidak bergantung secara penuh pada pihak lain.<sup>27</sup>

Dalam kerangka yang lebih luas, pemberdayaan juga berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial dan inklusi. Paulo Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientization*), yaitu proses di mana individu memahami realitas sosialnya dan mampu melakukan tindakan transformasi terhadap kondisi yang menindas. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada perubahan struktur sosial yang tidak adil, termasuk stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Dalam konteks disabilitas, khususnya penyandang tuna netra, pemberdayaan tidak dapat disederhanakan sebagai pemberian bantuan semata, melainkan harus diarahkan pada penguatan kemampuan hidup (*life skills*), peningkatan kepercayaan diri, serta penciptaan peluang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan inklusif, pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pemberdayaan juga menuntut adanya lingkungan yang inklusif, baik secara fisik (aksesibilitas fasilitas umum),

---

<sup>27</sup> Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

sosial (penerimaan masyarakat), maupun kebijakan (dukungan regulasi yang berpihak pada disabilitas).

Dengan menggunakan teori pemberdayaan, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas tuna netra. Peran tersebut dapat dilihat melalui upaya TKSK dalam memberikan pendampingan sosial, memfasilitasi akses terhadap pelatihan dan pekerjaan, serta mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Keberhasilan pemberdayaan dapat diukur dari meningkatnya kemampuan individu dalam mengelola kehidupannya secara mandiri, meningkatnya rasa percaya diri, serta terbukanya akses yang lebih luas terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Dengan demikian, teori pemberdayaan menjadi kerangka analisis yang penting untuk menilai efektivitas intervensi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.

### 3. Teori Disabilitas

Pendekatan yang menggeser cara pandang dari perspektif medis ke perspektif sosial. Model ini dikembangkan oleh Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) pada tahun 1970-an di Inggris. Dalam pendekatan ini ditegaskan bahwa disabilitas bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan atau kondisi fisik individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial yang tidak inklusif. Dengan kata lain, seseorang menjadi “disabilitas” bukan karena kondisi tubuhnya, tetapi karena

adanya hambatan eksternal yang membatasi partisipasinya dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Berbeda dengan *model medis* yang melihat disabilitas sebagai masalah individu yang harus “diperbaiki” melalui rehabilitasi atau pengobatan, model sosial menempatkan akar persoalan pada struktur sosial, lingkungan, dan sistem yang tidak ramah terhadap keberagaman kemampuan manusia. Dalam konteks ini, hambatan yang dihadapi penyandang tuna netra tidak hanya terletak pada gangguan penglihatan, tetapi juga pada berbagai faktor eksternal seperti fasilitas publik yang tidak aksesibel (misalnya ketiadaan *guiding block* atau penanda taktil), terbatasnya teknologi bantu (seperti *screen reader* atau buku braille), diskriminasi dalam dunia kerja, serta stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat.

Lebih lanjut, pemikiran tokoh seperti Michael Oliver memperkuat bahwa disabilitas adalah bentuk penindasan sosial (*social oppression*) yang dialami oleh kelompok tertentu akibat sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh model sosial tidak berfokus pada “mengubah individu”, melainkan pada “mengubah lingkungan” agar lebih inklusif dan aksesibel. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, pengembangan teknologi bantu, reformasi kebijakan publik yang inklusif, serta upaya sistematis untuk menghapus diskriminasi dan stigma sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, New York, 2006.

<sup>29</sup> Ronald L. Mace, *Universal Design: Housing for the Lifespan of All People*, North Carolina State University, 1998.

Dalam konteks penelitian ini, model sosial disabilitas sangat relevan untuk menganalisis hambatan yang dialami penyandang tuna netra dalam memperoleh pekerjaan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan kultural, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan yang inklusif, kurangnya pelatihan kerja yang sesuai, serta sikap diskriminatif dari pemberi kerja. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses kerja bukan semata-mata akibat kondisi disabilitas, tetapi lebih disebabkan oleh lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan kesempatan.

Teori ini juga memberikan arah solusi yang lebih komprehensif, yaitu melalui perubahan lingkungan dan sistem sosial. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, penyediaan fasilitas dan teknologi yang aksesibel, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas. Dalam kaitannya dengan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), teori ini membantu menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada individu penyandang tuna netra, tetapi juga pada upaya advokasi sosial, penguatan jaringan kelembagaan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

#### 4. Teori keadilan sosial (*social justice theory*)

Teori ini yang dikemukakan oleh John Rawls merupakan salah satu kerangka konseptual penting dalam memahami distribusi keadilan dalam masyarakat modern. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan sebagai kewajiban), di

mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebebasan dasar, serta adanya pengaturan sosial yang memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Pendekatan ini menolak ketimpangan yang tidak adil dan menuntut adanya intervensi sosial untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya.

Rawls mengemukakan dua prinsip utama dalam teorinya. Pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yaitu bahwa setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar, seperti kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak untuk bekerja. Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang paling dirugikan. Dengan kata lain, kebijakan publik harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mengangkat kondisi kelompok rentan, bukan justru memperlebar kesenjangan.<sup>30</sup>

Dalam konteks disabilitas, teori ini memberikan landasan normatif yang kuat bahwa penyandang disabilitas, termasuk tuna netra, berhak memperoleh perlakuan khusus (*affirmative action*) guna mencapai kesetaraan yang substantif. Kesetaraan dalam hal ini tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama secara mutlak, tetapi sebagai pemberian dukungan tambahan sesuai kebutuhan agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup penyediaan akses pendidikan inklusif, peluang kerja yang adil, fasilitas publik yang aksesibel, serta perlindungan hukum dari diskriminasi.

---

<sup>30</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53.

Teori keadilan sosial menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan. Kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas, seperti kuota kerja, pelatihan keterampilan, dan penyediaan teknologi bantu, merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip keadilan Rawlsian. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya bersifat distributif (pembagian sumber daya), tetapi juga mencakup keadilan prosedural (kesetaraan dalam proses) dan keadilan sosial (pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia).

Dalam penelitian ini, teori keadilan sosial digunakan untuk menilai sejauh mana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah berkontribusi dalam mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas tuna netra. Analisis ini mencakup bagaimana TKSK memfasilitasi akses terhadap layanan sosial, mendorong partisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok disabilitas. Jika peran tersebut mampu meningkatkan kesempatan dan kesejahteraan penyandang tuna netra, maka dapat dikatakan bahwa TKSK telah berkontribusi dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial. Sebaliknya, jika masih terdapat kesenjangan akses dan diskriminasi, maka diperlukan penguatan peran serta kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Secara lebih spesifik, penelitian ini menitikberatkan pada peran TKSK sebagai fasilitator, mediator, pendamping, dan penghubung dalam proses pemberdayaan, termasuk bagaimana TKSK memfasilitasi akses terhadap layanan sosial, menjembatani komunikasi antara penyandang disabilitas dengan berbagai pihak terkait, serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk-bentuk program atau upaya pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tuna netra, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan sosial, maupun dukungan aksesibilitas. Tidak kalah penting, penelitian ini turut mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran TKSK, yang dapat memengaruhi efektivitas pemberdayaan yang dilakukan.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aktivitas TKSK dalam memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra di wilayah Kecamatan Kota Sigli, sehingga tidak mencakup seluruh jenis disabilitas lainnya. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan mendalam dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas tuna netra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang

bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra, baik dari segi pelaksanaan program maupun dinamika yang terjadi di masyarakat.

#### B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif informan, khususnya terkait dengan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif pengalaman informan, peran sosial yang dijalankan, interaksi sosial yang terbentuk, serta dinamika pemberdayaan yang terjadi di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual.<sup>31</sup>

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana bentuk peran yang dijalankan oleh TKSK, strategi pemberdayaan yang dilakukan, serta berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Melalui

---

<sup>31</sup> Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed., SAGE Publications, 2017.

pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai interaksi sosial antara TKSK dengan penyandang disabilitas maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan secara lebih komprehensif. Peneliti dapat memahami bagaimana penyandang disabilitas tuna netra memaknai program pemberdayaan yang diterima, sejauh mana peran TKSK dirasakan manfaatnya, serta bagaimana kondisi sosial yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan tersebut. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pendapat mereka secara terbuka sehingga data yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan kontekstual.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kehadiran peneliti di lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh informan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra serta menghasilkan informasi yang dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan program kesejahteraan sosial yang lebih inklusif.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fokus penelitian. Pertama, masih terdapat penyandang disabilitas tuna netra di wilayah tersebut yang mengalami keterbatasan dalam mengakses peluang pekerjaan serta layanan sosial yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan yang seharusnya dapat mendukung kemandirian mereka. Kedua, peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah ini dinilai cukup strategis sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, sehingga penting untuk dikaji sejauh mana peran tersebut dijalankan secara efektif. Ketiga, terdapat fenomena bahwa upaya pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di wilayah ini belum berjalan secara optimal, baik dari segi program, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.<sup>33</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kecamatan Kota Sigli dianggap sebagai lokasi yang tepat dan relevan untuk mengkaji secara langsung bagaimana peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut.

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 128.

#### D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian Prosedur penelitian dalam studi ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi kegiatan studi pustaka untuk memperkuat landasan teori, penyusunan skripsi penelitian sebagai pedoman pelaksanaan, penentuan fokus penelitian agar penelitian lebih terarah, serta pengurusan izin penelitian kepada pihak-pihak terkait di lokasi penelitian.

Tahap kedua adalah penentuan informan, yang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti secara sengaja menentukan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam.<sup>34</sup>

Selanjutnya, tahap ketiga adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam untuk menggali informasi secara langsung dari informan, observasi untuk mengamati kondisi dan aktivitas di lapangan, serta dokumentasi sebagai data pendukung berupa arsip, catatan, atau dokumen terkait. Tahap keempat adalah analisis data yang dilakukan secara interaktif, yang meliputi proses reduksi data untuk menyederhanakan data yang diperoleh, penyajian data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian.

---

<sup>34</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 267.

Tahap terakhir adalah validasi data, yang dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data penelitian. Validasi ini dilakukan melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun teknik, serta *member check* dengan cara mengonfirmasi kembali data kepada informan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra.

#### E. Populasi dan Sampel

Populasi Dalam penelitian kualitatif, tidak digunakan istilah populasi dan sampel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan informan penelitian sebagai sumber utama data. Informan dipilih secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih mendalam, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.<sup>35</sup>

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Kota Sigli sebagai pelaksana utama pelayanan sosial di tingkat kecamatan; penyandang disabilitas tuna netra sebagai subjek yang menerima layanan pemberdayaan; serta pihak terkait, seperti Dinas Sosial atau lembaga yang menangani disabilitas, yang berperan dalam mendukung program pemberdayaan. Jumlah informan dalam

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 224.

penelitian ini adalah 9 orang, yang terdiri dari 2 orang TKSK, 4 orang penyandang disabilitas tuna netra, serta 3 orang dari pihak pendukung atau instansi/lembaga terkait. Komposisi ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang beragam sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

**Table 3.1 Informan Penelitian**

No	Kategori Informan	Jumlah Informan
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	2 orang
2	Penyandang Disabilitas Tuna Netra	4 orang
3	Dinas Sosial / Lembaga Terkait	3 orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>9 orang</b>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Melalui wawancara, peneliti berupaya memperoleh informasi terkait peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada

penyandang disabilitas tuna netra, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat kondisi nyata yang terjadi. Observasi ini bertujuan untuk memahami situasi dan konteks secara lebih mendalam, meliputi kondisi penyandang disabilitas tuna netra, aktivitas pemberdayaan yang berlangsung, serta pola interaksi sosial yang terbentuk antara penyandang disabilitas dengan lingkungan sekitarnya maupun dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan bersifat partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.<sup>37</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung, seperti foto kegiatan, dokumen program, serta data atau laporan dari instansi terkait. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti empiris yang dapat memperkuat hasil penelitian, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan yang diperoleh.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114.

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 143.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

## G. Teknik Analisis dan Pengelolaan Data

Analisis data merupakan langkah krusial yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas atau kesimpulan dari hasil penelitian. Proses ini melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari pencatatan data di lapangan, pengumpulan, penyortiran, hingga pengelompokan data tersebut.

1. Tahap pertama adalah pencatatan data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Data ini bisa berupa hasil wawancara, observasi, atau pengukuran lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, data yang telah terkumpul disortir dan dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema yang sesuai dengan topik penelitian.
2. Tahap selanjutnya adalah membuat catatan rinci mengenai data yang telah dikumpulkan, seperti hasil wawancara atau observasi. Setelah itu, catatan-catatan tersebut akan disaring dan disusun berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini.
3. Tahap terakhir adalah melakukan analisis terhadap data yang telah terorganisir tersebut. Proses analisis ini dilakukan dengan teliti, sesuai dengan isu yang menjadi fokus utama penelitian. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang akan disajikan dalam laporan penelitian sebagai temuan penting dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed., SAGE Publications, 2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kecamatan Kota Sigli merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi di Kabupaten Pidie. Secara historis, Kota Sigli dikenal sebagai pusat perkembangan pemerintahan lokal sejak masa pemerintahan tradisional hingga era modern saat ini. Perkembangan wilayah ini tidak terlepas dari peran Kabupaten Pidie sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi penting dalam sejarah sosial, budaya, dan pemerintahan di Aceh.<sup>40</sup>

Secara geografis, Kecamatan Kota Sigli terletak di wilayah pesisir utara Aceh yang memiliki akses langsung terhadap jalur transportasi utama lintas Banda Aceh–Medan. Letak yang strategis ini menjadikan Kecamatan Kota Sigli sebagai pusat mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Wilayah ini juga didukung oleh keberadaan berbagai fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, pasar tradisional, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi penopang kehidupan sosial ekonomi warga.

Kecamatan Kota Sigli terdiri dari beberapa gampong (desa) yang masing-masing memiliki karakteristik sosial yang beragam. Struktur masyarakat di

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, *Kecamatan Kota Sigli dalam Angka 2024* (Sigli: BPS Kabupaten Pidie, 2024), hlm. 3.

wilayah ini bersifat heterogen, dengan latar belakang pekerjaan yang bervariasi, seperti petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor informal sebagai sumber utama penghasilan, yang pada umumnya memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi.<sup>41</sup>

Berdasarkan data dari pemerintah daerah dan hasil observasi awal peneliti, jumlah penduduk Kecamatan Kota Sigli tergolong cukup padat dengan persebaran yang relatif merata di setiap gampong. Kepadatan penduduk ini turut memengaruhi dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam hal akses terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Dalam kondisi tersebut, masih terdapat kelompok masyarakat yang tergolong rentan, seperti keluarga miskin, lansia, anak terlantar, serta penyandang disabilitas.

Salah satu kelompok rentan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas tuna netra. Penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta layanan sosial. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kurangnya fasilitas umum yang aksesibel, terbatasnya teknologi bantu, serta masih adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat.

---

<sup>41</sup> Pemerintah Kabupaten Pidie, *Profil Kabupaten Pidie* (Sigli: Pemerintah Kabupaten Pidie, 2023), hlm. 7.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, penyandang disabilitas tuna netra seringkali mengalami marginalisasi, baik secara ekonomi maupun sosial. Sebagian dari mereka belum memiliki pekerjaan tetap, dan masih bergantung pada bantuan keluarga atau bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pemberdayaan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan masih memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih optimal.

Dalam konteks pelayanan kesejahteraan sosial, Kecamatan Kota Sigli memiliki peran penting melalui keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). TKSK merupakan perpanjangan tangan pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Pidie, dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Keberadaan TKSK sangat strategis karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi riil di lapangan.

Secara operasional, TKSK memiliki tugas utama dalam melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pendampingan sosial, memfasilitasi penyaluran bantuan sosial, serta menghubungkan masyarakat dengan berbagai program pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, TKSK juga berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengakses sumber daya, mediator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, pendamping yang memberikan dukungan sosial, serta penghubung yang mengintegrasikan berbagai layanan sosial.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara dengan beberapa pihak terkait, diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya program pelatihan yang berkelanjutan, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang menangani isu disabilitas juga belum berjalan secara optimal, sehingga program yang dilaksanakan belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya hasil pemberdayaan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tuna netra. Oleh karena itu, peran TKSK sebagai aktor kunci di tingkat kecamatan menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum di Kecamatan Kota Sigli yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, keberadaan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana keberhasilan program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan.

Penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam permasalahan yang diteliti. Informan terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),

penyandang disabilitas tuna netra, serta pihak-pihak terkait seperti aparaturn Dinas Sosial dan lembaga yang bergerak di bidang pelayanan sosial.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 2 orang TKSK, 4 orang penyandang disabilitas tuna netra, serta 3 orang dari instansi atau lembaga terkait. Informan dari kalangan penyandang disabilitas dipilih dengan kriteria memiliki pengalaman langsung dalam mengikuti program pemberdayaan atau pernah berinteraksi dengan TKSK. Sementara itu, informan dari pihak pemerintah dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra.

Dengan demikian, gambaran umum lokasi dan informan penelitian ini memberikan konteks yang jelas dan mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta dinamika pelayanan kesejahteraan sosial di Kecamatan Kota Sigli. Uraian ini menjadi dasar penting dalam menganalisis secara lebih lanjut peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

## B. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung informan terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli.

### 1. Karakteristik Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Informan dari unsur TKSK merupakan aktor kunci dalam penelitian ini karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. TKSK yang menjadi informan dalam penelitian ini umumnya memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dalam bidang pelayanan sosial, sehingga telah memahami secara mendalam kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Sigli.

Dari segi tugas dan fungsi, TKSK memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk penyandang disabilitas tuna netra, serta melakukan verifikasi dan validasi data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Selain itu, TKSK juga berperan dalam melakukan pendampingan sosial kepada masyarakat, khususnya

kelompok rentan, serta memfasilitasi akses terhadap berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga terkait.<sup>42</sup>

Dalam praktiknya, TKSK tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran sosial yang kompleks, seperti menjadi fasilitator dalam menghubungkan masyarakat dengan sumber daya, mediator dalam menyelesaikan permasalahan sosial, serta pendamping dalam proses pemberdayaan. Hal ini menjadikan TKSK sebagai sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian ini, karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai dinamika sosial di lapangan.

Selain itu, TKSK juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah kerja, serta kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perspektif dari TKSK sangat diperlukan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran tersebut dijalankan serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra.

## 2. Karakteristik Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Informan dari kelompok penyandang disabilitas tuna netra merupakan subjek utama dalam penelitian ini, karena mereka merupakan penerima manfaat dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh TKSK dan instansi terkait. Informan dalam kelompok ini memiliki kondisi keterbatasan penglihatan yang berbeda-beda, baik yang mengalami kebutaan sejak lahir maupun yang

---

<sup>42</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)* (Jakarta: Kemensos RI, 2020), hlm. 14.

mengalami gangguan penglihatan akibat faktor tertentu seperti penyakit atau kecelakaan.

Dari segi usia, informan penyandang tuna netra berada pada rentang usia produktif hingga non-produktif, sehingga memberikan gambaran yang beragam terkait pengalaman hidup dan kebutuhan mereka. Selain itu, latar belakang pendidikan informan juga bervariasi, mulai dari yang tidak menempuh pendidikan formal hingga yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah umum atau sekolah luar biasa.

Dari sisi ekonomi, sebagian besar informan berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Beberapa di antaranya belum memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada bantuan keluarga atau bantuan sosial dari pemerintah. Namun, terdapat pula informan yang telah memiliki aktivitas ekonomi tertentu, seperti usaha kecil atau pekerjaan informal, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengembangkan usahanya.

Pengalaman informan dalam mengikuti program pemberdayaan juga beragam. Ada informan yang pernah mendapatkan pelatihan keterampilan atau bantuan sosial, namun ada juga yang belum pernah mendapatkan intervensi secara optimal. Variasi pengalaman ini menjadi penting dalam penelitian, karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program pemberdayaan serta kesenjangan yang masih terjadi dalam implementasinya.

Selain itu, dari sisi sosial, penyandang disabilitas tuna netra juga menghadapi tantangan berupa stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan diri, partisipasi sosial, serta

motivasi mereka dalam meningkatkan kemandirian. Oleh karena itu, informasi dari kelompok ini sangat penting untuk memahami secara langsung kondisi riil yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Karakteristik Pihak Terkait (Dinas Sosial/Lembaga)

Informan dari pihak terkait terdiri dari aparatur Dinas Sosial atau lembaga lain yang memiliki keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Informan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari segi tugas dan fungsi, pihak terkait berperan dalam menyusun program pemberdayaan, mengalokasikan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TKSK, organisasi sosial, serta masyarakat.

Informan dari instansi ini umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang sosial, sehingga memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep pemberdayaan, kebijakan sosial, serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas tuna netra.

Melalui perspektif pihak terkait, penelitian ini dapat memperoleh gambaran mengenai kebijakan yang telah dirancang, strategi yang digunakan dalam pemberdayaan, serta berbagai kendala struktural yang dihadapi dalam

implementasi program. Hal ini penting untuk menghubungkan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas yang terjadi di lapangan.

#### 4. Signifikansi Karakteristik Informan dalam Penelitian

Keberagaman karakteristik informan dalam penelitian ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam pendekatan kualitatif. Dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang, penelitian ini mampu menghasilkan data yang lebih kaya, mendalam, dan komprehensif.

Informasi yang diperoleh dari TKSK memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program di tingkat lapangan, sementara informasi dari penyandang disabilitas tuna netra memberikan perspektif pengalaman langsung sebagai penerima manfaat. Di sisi lain, informasi dari pihak terkait memberikan sudut pandang kebijakan dan kelembagaan yang melatarbelakangi program pemberdayaan.

Kombinasi dari ketiga perspektif tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Selain itu, perbedaan latar belakang informan juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan, pelaksanaan, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, karakteristik informan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi data, tetapi juga sebagai landasan penting dalam menganalisis secara mendalam peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli.

### C. Peran TKSK dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Kota Sigli dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra dapat dianalisis dalam beberapa bentuk utama. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi sosial yang kompleks dan multidimensional, sesuai dengan konsep teori peran yang menekankan adanya hubungan antara status dan fungsi sosial yang dijalankan.

Secara umum, peran TKSK dalam penelitian ini meliputi sebagai fasilitator, mediator, pendamping, dan penghubung (*linking role*). Keempat peran ini saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra.

#### 1. Peran sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, TKSK memiliki peran dalam membantu penyandang disabilitas tuna netra untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian, TKSK berupaya memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan bantuan sosial, seperti bantuan sembako, bantuan tunai, serta program-program dari pemerintah yang ditujukan bagi kelompok rentan.

Selain itu, TKSK juga berperan dalam memfasilitasi akses terhadap pelatihan keterampilan, meskipun pelaksanaannya masih terbatas. Beberapa informan menyatakan bahwa pelatihan yang tersedia belum sepenuhnya sesuai

dengan kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra, baik dari segi materi maupun metode pelatihan yang digunakan.

Dalam praktiknya, peran fasilitator ini dilakukan melalui proses pendataan, pengajuan usulan bantuan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Namun demikian, efektivitas peran ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan program yang tersedia serta keterbatasan anggaran dari pemerintah.

## 2. Peran sebagai Mediator

Peran TKSK sebagai mediator terlihat dari fungsinya dalam menjembatani komunikasi antara penyandang disabilitas tuna netra dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial, lembaga pelatihan, maupun instansi lain yang terkait dengan pelayanan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, TKSK sering menjadi pihak yang menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas kepada instansi terkait. Sebaliknya, TKSK juga berperan dalam menyampaikan informasi mengenai program-program pemerintah kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Peran ini sangat penting karena banyak penyandang disabilitas tuna netra yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi secara langsung. Dengan adanya TKSK sebagai mediator, proses komunikasi menjadi lebih efektif dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat lebih terakomodasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran mediator ini juga menghadapi kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan respons dari instansi terkait terhadap kebutuhan yang disampaikan.

### 3. Peran sebagai Pendamping

Sebagai pendamping, TKSK memberikan dukungan secara langsung kepada penyandang disabilitas tuna netra, baik dalam bentuk pendampingan sosial maupun dukungan psikososial. Berdasarkan hasil penelitian, TKSK melakukan kunjungan ke rumah penyandang disabilitas untuk memantau kondisi mereka serta memberikan motivasi agar tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan.

Pendampingan ini mencakup pemberian bimbingan, arahan, serta dukungan moral yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Dalam beberapa kasus, TKSK juga membantu penyandang disabilitas dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan bantuan sosial atau program pemerintah.

Peran pendamping ini dinilai cukup penting, karena banyak penyandang disabilitas tuna netra yang mengalami keterbatasan dalam hal kepercayaan diri dan partisipasi sosial. Dengan adanya pendampingan, mereka merasa lebih diperhatikan dan didukung dalam menghadapi berbagai tantangan.

Meskipun demikian, intensitas pendampingan yang dilakukan masih terbatas karena jumlah TKSK yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, serta luasnya wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab mereka.

### 4. Peran sebagai Penghubung (*Linking Role*)

Peran TKSK sebagai penghubung (*linking role*) merupakan salah satu fungsi penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Dalam peran ini, TKSK membantu menghubungkan penyandang disabilitas dengan

berbagai peluang, seperti program pelatihan, bantuan usaha, maupun kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, TKSK berupaya mengarahkan penyandang disabilitas untuk mengikuti program-program yang tersedia, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Namun, peluang kerja bagi penyandang disabilitas tuna netra masih sangat terbatas, sehingga peran ini belum dapat berjalan secara optimal.

Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta masih adanya stigma dari masyarakat dan dunia kerja menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan tidak hanya bergantung pada peran TKSK, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

Peran TKSK dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam akses pelatihan, peluang kerja, serta dukungan program yang berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori peran, TKSK telah menjalankan fungsi sesuai dengan peran yang diharapkan, namun masih terdapat kesenjangan antara peran ideal (*expected role*) dengan peran yang dijalankan (*actual role*) di lapangan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan kebijakan, serta kondisi sosial masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan peran TKSK melalui peningkatan kapasitas, dukungan program yang lebih terarah, serta koordinasi

yang lebih baik antar lembaga, agar proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

#### D. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli masih beragam, namun cenderung belum sepenuhnya mengarah pada pemberdayaan yang bersifat mandiri (*empowerment*). Program yang ada masih didominasi oleh pendekatan bantuan sosial yang bersifat karitatif.

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang ditemukan di lapangan antara lain sebagai berikut:

##### 1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi yang paling dominan diberikan kepada penyandang disabilitas tuna netra. Bantuan ini meliputi bantuan sembako, bantuan tunai, serta bantuan dari program pemerintah lainnya.

*“Biasanya bantuan yang diberikan itu berupa sembako sama bantuan uang. Itu sangat membantu mereka untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi yang tidak punya pekerjaan tetap.”<sup>43</sup>*

Selain itu, salah satu penyandang disabilitas tuna netra juga menyampaikan:

*“Kami sangat terbantu dengan bantuan itu, tapi memang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja, belum bisa untuk usaha atau kerja.”<sup>44</sup>*

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan petugas TKSK di kantor dinas sosial kabupaten pidie pada tanggal 20 Juli 2025

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar, namun belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

## 2. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas dalam memperoleh penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Melalui pelatihan keterampilan, penyandang disabilitas diharapkan memiliki kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara mandiri. Pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dan lembaga sosial dalam menciptakan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas tuna netra.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelatihan keterampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli masih terbatas dan belum berjalan secara berkelanjutan. Program pelatihan yang ada dinilai belum mampu memberikan dampak yang optimal karena pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin serta belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang membutuhkan.

*“Memang ada pelatihan, tapi tidak rutin. Kadang hanya sekali-sekali saja, dan belum semua penyandang disabilitas bisa ikut.”<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sk Sebagai penyandang disabilitas tuna netra pada tanggal 21 Juli 2025

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak perwakilan dinas sosial pada tanggal 20 Juli 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi frekuensi kegiatan maupun cakupan peserta. Kondisi ini menyebabkan sebagian penyandang disabilitas belum memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti program pemberdayaan. Selain itu, keterbatasan pelatihan juga berdampak pada kurang optimalnya peningkatan keterampilan dan kemampuan kerja penyandang disabilitas tuna netra.

*“Saya pernah ikut pelatihan, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya. Jadi kami bingung mau lanjut bagaimana.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelatihan yang diberikan belum memberikan dampak jangka panjang karena kurangnya tindak lanjut dan keberlanjutan program. Setelah pelatihan selesai, peserta belum mendapatkan pendampingan lanjutan, akses modal usaha, maupun dukungan pemasaran yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh. Akibatnya, kemampuan yang diperoleh melalui pelatihan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tuna netra.

Selain itu, keterbatasan program pelatihan juga menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga sosial, maupun masyarakat. Program pelatihan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian keterampilan semata, tetapi juga perlu dirancang secara berkelanjutan dengan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan SP sebagai penyandang disabilitas tuna netra pada tanggal 15 Agustus 2025

mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan kondisi penyandang disabilitas agar hasil yang dicapai lebih efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara nyata.

### 3. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan langsung oleh TKSK melalui interaksi dengan penyandang disabilitas tuna netra. Pendampingan ini mencakup motivasi, bimbingan, serta dukungan psikososial.

*“Kami sering datang untuk melihat kondisi mereka, memberi semangat, dan membantu kalau ada kesulitan, terutama dalam urusan bantuan atau administrasi.”<sup>47</sup>*

Sementara itu, penyandang disabilitas juga mengungkapkan:

*“Kalau ada TKSK datang, kami merasa diperhatikan. Mereka sering kasih semangat supaya kami tidak putus asa.”<sup>48</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan sosial memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologis dan kepercayaan diri penyandang disabilitas, meskipun masih perlu ditingkatkan dari segi intensitas dan sistematika.

### 4. Akses terhadap Layanan Pemerintah

Bentuk pemberdayaan lainnya adalah pemberian akses terhadap layanan pemerintah, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan administrasi kependudukan.

*“Kami membantu mereka untuk mengurus bantuan, seperti KTP, BPJS, atau bantuan sosial lainnya, karena mereka kadang kesulitan mengurus sendiri.”<sup>49</sup>*

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan petugas TKSK di kantor dinas sosial pada tanggal 20 Juli 2025

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan SP sebagai penyandang disabilitas tuna netra pada tanggal 15 Agustus 2025

Dari sisi penerima manfaat, salah satu informan menyatakan:

*“Kalau tidak dibantu, kami sulit untuk mengurus sendiri karena keterbatasan kami.”*<sup>50</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa peran TKSK sangat penting dalam membuka akses terhadap layanan dasar, meskipun belum sepenuhnya mencakup akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.

#### E. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor-faktor ini sangat menentukan tingkat keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan di lapangan.

##### 1. Faktor Pendukung

###### a. Keberadaan TKSK sebagai Ujung Tombak Pelayanan Sosial

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra adalah keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pelaksana langsung program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. TKSK memiliki posisi yang sangat

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan petugas TKSK di kantor dinas sosial pada tanggal 20 Juli 2025

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Sk sebagai penyandang disabilitas tuna netra di rumahnya pada tanggal 26 Juli 2025

strategis karena berada di garis depan (front line worker) dalam sistem pelayanan sosial pemerintah, sehingga mereka menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung kondisi sosial ekonomi warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Kedekatan TKSK dengan masyarakat menjadi salah satu keunggulan penting dalam proses pemberdayaan. Hal ini memungkinkan TKSK untuk tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan, termasuk hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tuna netra dalam mengakses layanan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Dengan demikian, TKSK dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

*“Kami sebagai TKSK memang berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka, karena kami yang langsung turun ke lapangan dan tahu kondisi mereka.”<sup>51</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran TKSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat aktif dan partisipatif dalam proses pemberdayaan. TKSK terlibat langsung dalam identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga proses pendampingan sosial kepada penyandang disabilitas tuna netra. Peran ini menjadi sangat penting karena tanpa pendampingan yang intensif, kelompok disabilitas sering kali kesulitan untuk mengakses layanan yang tersedia. Selain itu, keberadaan TKSK juga mempermudah proses pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan berkelanjutan. Data yang valid menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial maupun pelaksanaan program pemberdayaan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan seorang TKSK di kantor dinas sosial pada tanggal 25 Juli 2025

lainnya. Dengan adanya TKSK, proses verifikasi lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga potensi terjadinya kesalahan sasaran (inaccurate targeting) dalam bantuan sosial dapat diminimalisir.

Tidak hanya itu, TKSK juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi sosial, maupun organisasi masyarakat. Peran sebagai mediator ini memungkinkan penyandang disabilitas tuna netra untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan TKSK sebagai ujung tombak pelayanan sosial memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung efektivitas pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Tanpa peran aktif TKSK di lapangan, proses pendampingan, penyaluran bantuan, dan penguatan kapasitas penyandang disabilitas akan sulit berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

#### b. Dukungan Program Pemerintah

Faktor pendukung lainnya dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra adalah adanya berbagai program pemerintah yang secara khusus ditujukan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Program-program tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan, sebagaimana amanat dalam kebijakan perlindungan sosial yang berlaku. Bentuk program tersebut meliputi bantuan sosial tunai maupun non-tunai, layanan kesehatan

melalui jaminan kesehatan nasional, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Keberadaan program-program tersebut pada dasarnya menjadi landasan penting dalam pelaksanaan proses pemberdayaan di tingkat daerah, termasuk di Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Program pemerintah memberikan kerangka kerja dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh TKSK dalam melaksanakan tugas pendampingan dan fasilitasi kepada penyandang disabilitas.

Dengan adanya program tersebut, proses intervensi sosial menjadi lebih terarah karena telah memiliki pedoman dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah.

*“Pemerintah sebenarnya sudah memiliki program untuk penyandang disabilitas, hanya saja pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.”<sup>52</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan kebijakan, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam tataran implementasi di lapangan, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan program tersebut belum berjalan secara optimal. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sosialisasi program, kurangnya pemerataan akses informasi, serta belum maksimalnya koordinasi antara instansi pelaksana di tingkat daerah.

Efektivitas program juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan, termasuk TKSK sebagai pelaksana di tingkat kecamatan. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, program yang

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan pegawai dinas sosial Pidie di kantor pada tanggal 25 Juli 2025

sudah dirancang dengan baik berpotensi tidak memberikan dampak yang maksimal bagi penerima manfaat.

Meskipun demikian, keberadaan program pemerintah tetap menjadi faktor penting yang mendukung proses pemberdayaan. Program tersebut memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap bantuan, pelatihan, serta layanan dasar lainnya yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting agar tujuan pemberdayaan, yaitu kemandirian dan inklusi sosial penyandang disabilitas, dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Keterbatasan Anggaran

Salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Ketersediaan dana merupakan aspek fundamental dalam setiap pelaksanaan program sosial, karena anggaran berfungsi sebagai penopang utama dalam pembiayaan berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha, pendampingan sosial, hingga penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas.

Keterbatasan anggaran menyebabkan ruang gerak pelaksanaan program menjadi terbatas. Program pemberdayaan yang seharusnya dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas, pada kenyataannya hanya dapat dilaksanakan dalam skala yang terbatas. Akibatnya, tidak semua penyandang

disabilitas tuna netra dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan maupun menerima bantuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian mereka.

*“Kendala utama biasanya di anggaran, jadi program yang ada belum bisa menjangkau semua kebutuhan.”<sup>53</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Walaupun secara perencanaan program telah disusun dengan baik, namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, implementasi di lapangan menjadi tidak optimal.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada keberlanjutan program. Banyak kegiatan pemberdayaan yang bersifat jangka pendek sehingga tidak memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas. Idealnya, pemberdayaan membutuhkan proses yang berkesinambungan, mulai dari pelatihan dasar, pendampingan lanjutan, hingga penguatan akses pasar atau pekerjaan. Namun, keterbatasan dana sering kali membuat program hanya berjalan pada tahap awal saja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan alokasi anggaran serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak-pihak terkait lainnya agar program pemberdayaan penyandang disabilitas dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan pegawai dinas sosial Pidie di kantor pada tanggal 25 Juli 2025

## b. Stigma dan Diskriminasi Masyarakat

Stigma dan diskriminasi masyarakat masih menjadi salah satu hambatan sosial yang cukup signifikan dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra. Stigma tersebut muncul dari cara pandang sebagian masyarakat yang masih melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak mampu, bergantung pada orang lain, serta tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk bekerja secara mandiri. Pandangan negatif ini secara tidak langsung membentuk batas sosial (*social barrier*) yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks dunia kerja, stigma tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Banyak pihak masih meragukan kemampuan mereka, sehingga enggan memberikan ruang atau peluang kerja yang setara. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kali tersingkir dari pasar kerja formal dan hanya memiliki akses terbatas pada pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak menentu.

*“Kadang kami dianggap tidak mampu, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan.”<sup>54</sup>*

Pernyataan tersebut menggambarkan secara nyata bagaimana stigma sosial berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas, khususnya dalam hal akses terhadap pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Penilaian negatif dari lingkungan sekitar tidak hanya membatasi kesempatan mereka, tetapi juga memengaruhi

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Sk sebagai penyandang disabilitas tuna netra di rumahnya pada tanggal 26 Juli 2025

kondisi psikologis, seperti menurunnya rasa percaya diri dan motivasi untuk berkembang.

Stigma yang terus berkembang di masyarakat juga berdampak pada proses pemberdayaan yang dilakukan oleh TKSK maupun pemerintah. Meskipun berbagai program telah disediakan, namun jika masyarakat masih memiliki pandangan diskriminatif, maka proses integrasi sosial penyandang disabilitas akan berjalan lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat struktural melalui program pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan sosial dan kultural di masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya diskriminasi. Padahal, dengan dukungan yang tepat dan lingkungan yang inklusif, penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Penguatan nilai inklusi sosial menjadi sangat penting agar stigma dan diskriminasi dapat diminimalisir, sehingga penyandang disabilitas tuna netra dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Koordinasi Antar Lembaga Belum Optimal

Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Sosial,

serta lembaga atau organisasi terkait lainnya. Koordinasi yang efektif merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program sosial, karena pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak secara sinergis.

Koordinasi antar lembaga masih mengalami beberapa kendala, seperti kurangnya komunikasi yang intensif, belum adanya pembagian peran yang jelas, serta keterbatasan dalam mekanisme integrasi program. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan sering berjalan secara terpisah (parsial), sehingga dampaknya menjadi kurang maksimal terhadap penerima manfaat.

*“Kadang koordinasi antar lembaga belum maksimal, sehingga program tidak berjalan secara terintegrasi.”<sup>55</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan. Ketika setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinkronisasi, maka potensi tumpang tindih program maupun ketidaktepatan sasaran menjadi lebih besar. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya hasil yang dicapai oleh program pemberdayaan itu sendiri.

Kurangnya koordinasi juga mempengaruhi keberlanjutan program. Program pemberdayaan yang seharusnya bersifat berkesinambungan menjadi tidak konsisten karena tidak adanya kesinambungan antara satu program dengan program lainnya. Padahal, pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan

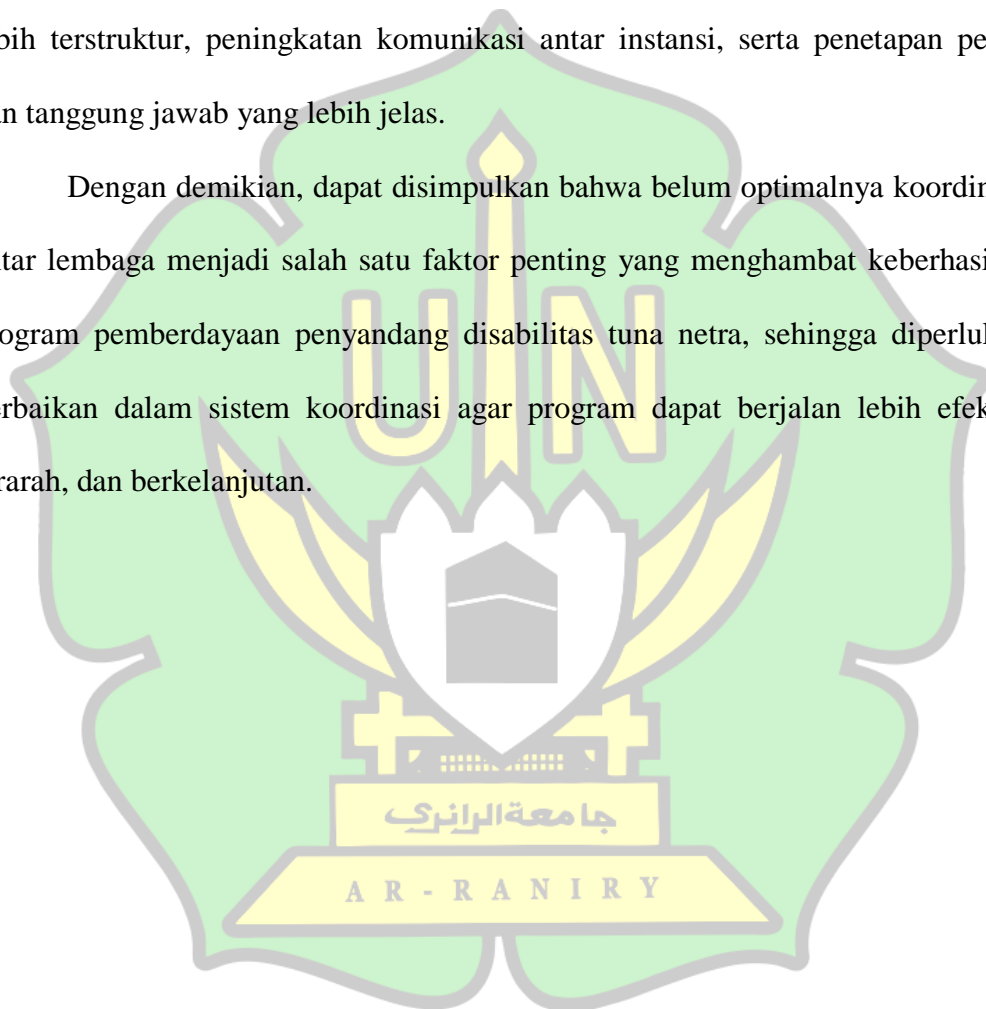
---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan petugas TKSK di kantor dinas sosial pada tanggal 20 Juli 2025

proses jangka panjang yang melibatkan pendampingan, pelatihan, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur, peningkatan komunikasi antar instansi, serta penetapan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor penting yang menghambat keberhasilan program pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra, sehingga diperlukan perbaikan dalam sistem koordinasi agar program dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan bahwa TKSK memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemberdayaan kelompok rentan tersebut. Peran yang dijalankan oleh TKSK mencakup fungsi sebagai fasilitator, mediator, pendamping, dan penghubung (*linking role*), yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa TKSK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, TKSK membantu penyandang disabilitas tuna netra dalam memperoleh akses terhadap bantuan sosial dan layanan pemerintah. Sebagai mediator, TKSK berperan dalam menjembatani komunikasi antara penyandang disabilitas dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan lembaga lainnya. Sementara itu, sebagai pendamping, TKSK memberikan dukungan sosial, motivasi, serta bimbingan kepada penyandang disabilitas dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang mereka alami. Adapun sebagai penghubung, TKSK berupaya mengarahkan penyandang disabilitas pada berbagai program pemberdayaan dan peluang yang tersedia.

Pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dihadapi, seperti minimnya sumber daya, terbatasnya program yang bersifat berkelanjutan, serta belum adanya sistem yang

sepenuhnya mendukung inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain, meskipun TKSK telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, hasil yang dicapai masih belum maksimal dalam mendorong kemandirian penyandang disabilitas tuna netra.

Bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli pada umumnya masih didominasi oleh bantuan sosial, seperti bantuan sembako dan bantuan tunai. Selain itu, terdapat pula upaya pemberdayaan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pemberian akses terhadap layanan pemerintah. Meskipun demikian, bentuk pemberdayaan tersebut masih cenderung bersifat karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang diterapkan masih belum sejalan dengan konsep pemberdayaan dalam perspektif teoritis, yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini juga menemukan adanya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan. Faktor pendukung antara lain keberadaan TKSK sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tingkat kecamatan, adanya program pemerintah yang ditujukan bagi kelompok rentan, serta mulai

tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Namun, berbagai faktor penghambat masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemberdayaan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, masih adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat, minimnya akses terhadap dunia kerja, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terkait.

## B. Saran

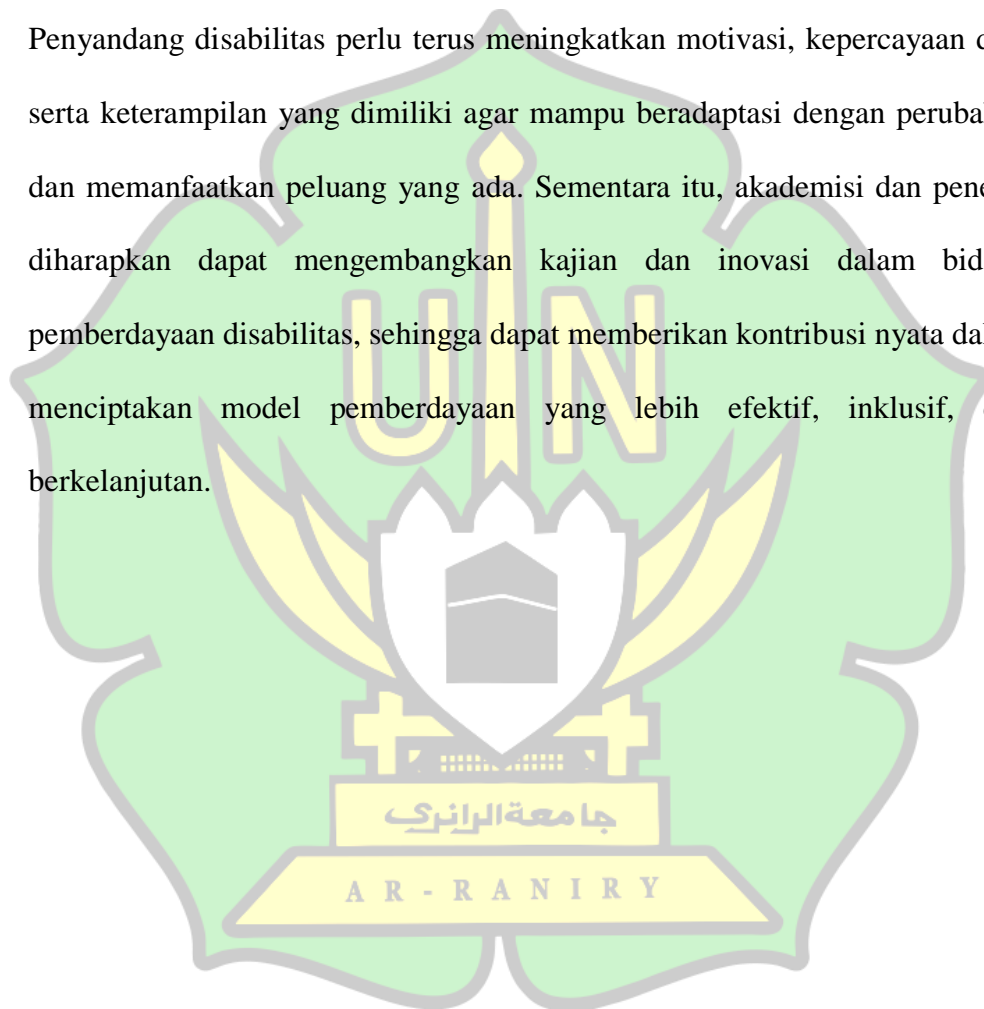
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli. Saran ini disusun secara ringkas namun tetap mencakup aspek strategis yang relevan dengan temuan penelitian.

1. **Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait,** diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pemberdayaan dengan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, terarah, dan berbasis kebutuhan penyandang disabilitas. Program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga harus mengarah pada peningkatan kapasitas, keterampilan, serta kemandirian ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran, memperluas kerja sama dengan sektor swasta, serta membuka peluang kerja yang lebih luas melalui kebijakan afirmatif yang mendukung penyandang disabilitas.

2. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai agen pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada proses pendampingan yang berkelanjutan dan terarah. TKSK perlu meningkatkan intensitas pendampingan sosial, memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga, serta mengembangkan kapasitas diri dalam memahami isu-isu disabilitas. Dengan demikian, peran TKSK dapat lebih optimal dalam mendorong kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
3. **Pengembangan program pelatihan dan pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan** perlu menjadi perhatian utama, dengan memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas tuna netra serta relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan harus dilengkapi dengan metode yang aksesibel, pendampingan lanjutan, serta dukungan dalam bentuk akses modal atau peluang kerja. Selain itu, pembentukan komunitas atau kelompok usaha penyandang disabilitas juga penting untuk memperkuat solidaritas, pertukaran informasi, dan pengembangan usaha secara kolektif.
4. **Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif,** dengan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan sosial dari masyarakat serta keterlibatan sektor swasta dalam membuka peluang kerja menjadi faktor penting dalam keberhasilan

pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi sosial yang berkelanjutan serta kebijakan yang mendorong partisipasi dunia usaha dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

5. **Penyandang disabilitas tuna netra dan pihak akademisi/peneliti** diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung proses pemberdayaan. Penyandang disabilitas perlu terus meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, serta keterampilan yang dimiliki agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Sementara itu, akademisi dan peneliti diharapkan dapat mengembangkan kajian dan inovasi dalam bidang pemberdayaan disabilitas, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan model pemberdayaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. *Kecamatan Kota Sigli dalam Angka 2024*. Sigli: BPS Kabupaten Pidie, 2024.
- Biddle, Bruce J. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 1979.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hidayati, L., & Kurniawan, F. "Hambatan sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia." *Jurnal Sosiologi*, 12(1), 2021.
- Ife, Jim, & Frank Tesoriero. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemensos RI, 2018.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)*. Jakarta: Kemensos RI, 2018.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)*. Jakarta: Kemensos RI, 2020.
- Linton, Ralph. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century, 1936.

- Mace, Ronald L. *Universal Design: Housing for the Lifespan of All People*. North Carolina State University, 1998.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Pratiwi, N., & Hidayat, R. "Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan kemandirian ekonomi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 2020.
- Rahmawati, D., & Suyanto, B. "Peran TKSK dalam penanganan PMKS di Kabupaten Bantul." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 2019.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saputra, R., & Lestari, M. "Implementasi program pemberdayaan disabilitas oleh Dinas Sosial." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 2019.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York, 2006.
- WHO (World Health Organization). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press, 2011.
- WHO (World Health Organization). *Blindness and Vision Impairment*. Geneva: WHO, 2019.
- Wulandari, S., & Nugroho, A. "Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi tuna netra." *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(3), 2018.
- Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Boston: Cengage Learning, 2010.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara Dengan Instrumen Penelitian



Sumber; Saatpeneliti dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, pada tanggal 20 Juli 2025.



Sumber; Saat peneliti mewawancarai informan penyandang disabilitas tuna netra di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, 26 Juli 2025.